



Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, layakkah?
: Senin, 25 Agustus 2025
: Rakyat Merdeka
: 2

Rencana Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan, Layakkah?

Pemerintah berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap pada 2026. Rencana kenaikan itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.

Dalam buku itu, pemerintah menjelaskan dalam kerangka pendanaan perlu ada penyesuaian iuran. Dan penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap demi meminimalisir gejolak, sekaligus menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan menambah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menurutnya, keputusan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari APBN.

"Waktu keputusan menaikkan tarif BPJS memutuskan PBI dinilai arinya dari APBN tapi yang di mandiri ga dinilai makna memberikan subsidi sebagian. Dari mandiri itu masih di Rp25 ribu seharusnya Rp42ribu jadi Rp7.000 nya dibayar pemerintah terutama PBPB," ujarnya.

Berapa jumlah kenaikan iurannya? Sri Mulyani belum mau mengungkap besaran kenaikan iuran BPJS yang akan dilakukan pada tahun depan.

Kata dia pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian iuran akan dibahas oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. "Lembaga itu lah yang diberikan mandat untuk membahas," ujarnya.

Menanggapi rencana itu, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengaku secara resmi Komisi IX belum membahas mengenai rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

Tetapi, dengan situasi keuangan pemerintah yang deficit, menaikkan tarif bisa saja tapi hanya bagi yang mampu.

Sementara, Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FARKES) KSPI Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dimas P Wardhana menentang keras rencana menaikkan tarif BPJS Kesehatan.

"Kami menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan," tegas Dimas.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Irma Suryani Chaniago dan Dimas P Wardhana mengenai rencana pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan secara bertahap di tahun 2026. Berikut wawancaranya.

DIMAS P WARDHANA, Wakil FARKES KSPI Bidang Hubungan Antar Lembaga

Ekonomi Lagi Sulit Bisa Bebani Rakyat



“

Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki pelayanan dan memastikan pengelolaan BPJS Kesehatan lebih transparan, bukan dengan cara menaikkan iuran.

Rencananya, iuran BPJS Kesehatan akan naik di tahun 2026. Apa tanggapan Anda?

Kami dari KSPI, khususnya unit FSP (Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan) KSPI, menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Apakah buruh akan melakukan aksi juga?

Sebelum melakukan aksi, kami akan menggelar dialog dan advokasi ke berbagai instansi, termasuk kantor resmi pesuluh kepada Presiden, Menteri Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Berikutnya, kami akan melakukan

apakah Anda dan teman-teman buruh akan lakukan?

KSPI bersama Jaminkeswati I salut seluruh pemain jaminan kesehatan yang dibentuk KSPI akan terus mendorong agar hasil pekerjaan rakyat atas jaminan kesehatan tidak diikurangi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Kenaikannya secara bertahap. Apa respon dan tanggapan Anda?

Kami mengingatkan bahwa iuran ini yang kemungkinan akan ada masing-masing.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Kenaikannya secara bertahap. Apa respon dan tanggapan Anda?

Pada dasarnya, di tengah keadaan ekonomi yang kurang baik (defisit APBN) masih tidak mau untuk menaikkan iuran bagi peserta yang mandiri (kategori mampu) direncanakan adanya kenaikan.

Bisa Anda jelaskan kategori mandiri?

Peserta mandiri ini kan ekonominya ada yang sangat mampu, mampu dan setengah mampu.

Kalau yang sangat mampu dan mampu, mungkin tidak ada masalah dengan kenaikan tarif. Bagaimana dengan yang setengah mampu?

Kami mengingatkan bahwa iuran ini yang kemungkinan akan ada masing-masing.

Ditambah lagi dengan adanya efisiensi transfer daerah, tentu Pemda akan kesulitan juga untuk membayar iuran yang mereka bayar.

Bukan Penerima Upah atau PBPB BPJS Ditambah lagi saat ini ada himbauan banyak penerima bantuan iuran yang tidak tiba di nomor akhir tanpa alasan dan penberitahuan.

Bagaimana mitra BPJS. Apa yang ada lakukan?

Kami meminta kepada BPJS untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos terkait data valid orang miskin yang memang harus dicover Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Tapi, pada prinsipnya Anda mendukung adanya kenaikan tarif BPJS atau tidak?

Sampai saat ini, Komisi IX DPR masih belum setuju adanya kenaikan tarif BPJS.

Kesopongan Anda kurang setuju?

Sekedar itu. Saya mendukung ini ada tambahan anggaran 10 triliun rupiah untuk menyukseskan kenaikan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 10 triliun ini infonya untuk dana cadangan. ■ REN

IRMA SURYANI CHANIAGO

Anggota Komisi IX DPR

Dinaikkan Untuk Kategori Mampu



“

Kami meminta kepada BPJS untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos terkait data valid orang miskin yang memang harus dicover Penerima Bantuan Iuran.